

LAMPIRAN

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT. TELKOM INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**NERACA KONSOLIDASIAN**  
**31 DESEMBER 2010 DAN 2009**  
**(Angka dinyatakan dalam jutaan Rupiah)**

		<b><u>2010</u></b>	<b><u>2009</u></b>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	Rp.	9.119.849	7.805.460
Penyertaan sementara	Rp.	370.433	359.507
Piutang usaha			
Pihak yang memplunyai hubungan istimewa - setelah dikurangi penyisihan piutang raga- ragu sebesar Rp151.266 juta di tahun 2010 dan Rp93.483 juta di tahun 2009	Rp.	780.043	604.768
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang rag-j-ragu sebesar Rp1.294.078 juta di tahun 2010 dan Rp1.180.067 juta di tahun 2009	Rp.	3.563.666	3.184.916
Piutang lain lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu ragu sebesar Rp6.304 juta di tahun 2010 dan Rp9.517 juta di tahun 2009	Rp.	90.140	128.025
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar Rp83.286 juta di tahun 2010 dan Rp72.174 juta di tahun 2009	Rp.	515.536	435.244
Uang muka dan beban dibayar di muka	Rp.	3.441.031	2.496.539
Tagihan restitusi pajak	Rp.	133.056	666.351
Pajak dibayar di muka	Rp.	715.698	379.732
Aset lancar lainnya	Rp.	1.175	125.482
Jumlah Aset Lancar	Rp.	<u>18.730.627</u>	<u>16.186.024</u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Penyertaan jangka panjang - bersih	Rp.	253.850	151.553
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp83.712.378 juta di tahun 2010 dan Rp72.716.079 juta di tahun 2009	Rp.	75.832.408	76.419.897
Pension dibayar di muka	Rp.	988	497
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	Rp.	3.052.695	2.488.842
Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya - setelah dikurangi akumulasi; amortisasi sebesar Rp9.094.032 juta di tahun 2010 dan Rp7.570.659 juta di tahun 2009	Rp.	1.784.525	2.428.280
Rekening escrow	Rp.	41.662	44.114
Aset, pajak larigguhan - bersih	Rp.	61.692	94.953
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp.	<u>81.027.820</u>	<u>81.628.136</u>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>99.758.447</u></b>	<b><u>97.814.160</u></b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT. TELKOM INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**NERACA KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2010 DAN 2009**  
**(Angka dinyatakan dalam jutaan Rupiah)**

	<u><b>2009</b></u>	<u><b>2010</b></u>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Hutang usaha		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Rp. 1.153.874	1.759.468
Pihak ketiga	Rp. 6.356.921	8.038.586
Hutang lain lain	Rp. 20.953	3.162
Hutang pajak	Rp. 735.69	1.749.789
Hutang divider	Rp. 255.545	405.175
Beban yang masih harus dibayar	Rp. 3.409.260	4.118.994
Pendapatan diterima di muka	Rp. 2.681.483	2.946.532
Uang muka pelanggan dan pemasok	Rp. 499.705	111.356
Hutang bank jangka pendek	Rp. 55.831	43.850
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	Rp. 5.303.636	7.716.213
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	<u>Rp. 20.472.898</u>	<u>26.893.125</u>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	Rp. 4.073.814	3.220.510
Pendapatan diterima di muka	Rp. 312.029	393.078
Kewajiban penghargaan masa kerja	Rp. 242.149	212.518
Kewajiban imbalan keschalan pasca kerja	Rp. 1.050.030	1.801.776
Kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	Rp. 536.990	808.317
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang latuh tempo dalam satu tahun		
Kewajiban sewa pembiayaan	Rp. 408.867	541.575
Pinjaman penerusan - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Rp. 2.741.303	3.094.110
Obligasi dari wesel bayar	Rp. 3.249.379	68.777
Hutang bank	Rp. 10.256.205	11.086.688
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	Rp.	108.079
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	<u>Rp. 22.870.766</u>	<u>21.335.428</u>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<u><b>Rp. 43.343.664</b></u>	<u><b>48.228.553</b></u>
<b>HAK MINORITAS</b>	<u><b>Rp. 11.996.041</b></u>	<u><b>10.933.347</b></u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT. TELKOM INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**NERACA KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**  
**31 DESEMBER 2010 DAN 2009**  
**(Angka dinyatakan dalam jutaan Rupiah)**

	<u><b>2009</b></u>	<u><b>2010</b></u>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham - nilai nominal Rp.250 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B		
Modal dasar - 1 saham seri A Dwisarna dan 79.999.999.999 saham seri B		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.59.999.279 saham Seri B	Rp. 5.040.000	5.040.000
Tambahan modal disetor	Rp. 1.073.333	1.073.333
Modal saham yang d:peroleh kembali - 490.574.500 lembar saham di tahun 2010 dan 2009	Rp. (4.264.073)	(4.264.073)
Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali.	Rp. 478,000	478,000
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaar, asosiasi	Rp. 385,595	385,595
Laba belum direalisasi alas kepemilikan efek yang lersedia untuk dijual	Rp. 49,695	18,136
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Rp. 233,378	230,995
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan minoritas pada anak perusahaan	Rp. (484,629)	(439,444)
Saldo laba	Rp.	
Dilentukan penggunaannya	Rp. 15.336.746	15.336.746
Belum ditentukan penggunaannya	Rp. <u>26.570.697</u>	<u>20.792.972</u>
Jumlah Ekuitas	Rp. <u>44.418.742</u>	<u>38.652.260</u>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>Rp. <u>99.758.447</u></b>	<b><u>97.814.160</u></b>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT. TELKOM INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN**

**LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN**  
**TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009**  
**(Angka dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per sahan dan per ADS)**

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
<b>PENDAPATAN USAHA</b>		
Telepon	Rp. 12.940.007	14.286.212
Tidak bergerak	Rp. 29.133.595	28.532.530
Seluler	Rp. 3.735.376	3.866.642
Interkoneksi	Rp. 19.801.097	18.511.587
Data, internet, dan jasa teknologi informatika		
Jaringan	Rp. 1.058.159	1.218.013
Jasa telekomunikasi lainnya	Rp. 1.960.947	1.262.534
Jumlah Pendapatan Usaha	<u>Rp. 68.629.181</u>	<u>67.677.518</u>
<b>BEBAN USAHA</b>		
Penyusulan dan amortisasi	Rp. 14.611.458	13.974.804
Karyawan	Rp. 7.516.470	8.533.157
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	Rp. 16.046.414	14.549.413
Umum dan administrasi	Rp. 2.352.146	2.643.788
Interkoneksi	Rp. 3.086.355	2.929.260
Pemasaran	Rp. 2.525.218	2.259.460
Jumlah Beban Usaha	<u>Rp. 46.138.061</u>	<u>44.889.862</u>
<b>LABA USAHA</b>	<u>Rp. 22.491.120</u>	<u>22.787.636</u>
<b>(BEBAN) PENGHASILAN LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan bunga	Rp. 421.354	462.169
Bagian (rugi) laba bersih perusahaan asosiasi	Rp. (13.622)	(29.715)
Beban bunga	Rp. (1.928.035)	(2.095.978)
Laba (rugi) selisih kurs bersih	Rp. 42.948	972.947
Lain(lain bersih)	Rp. 402.586	349.962
Beban lain(lain bersih)	<u>Rp. (1.074.769)</u>	<u>(340.615)</u>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<u>Rp. 21.416.351</u>	<u>22.447.021</u>
<b>(BEBAN) MANFAAT PAJAK</b>		
Pajak kini	Rp. (4.669.394)	(6.029.701)
Pajak tangguhan	Rp. (876.645)	(374.422)
	Rp. (5.546.039)	(6.404.123)
<b>LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI</b>	<b>Rp. 15.870.312</b>	<b>16.042.898</b>
<b>HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI - Bersih</b>	<b>Rp. (4.333.313)</b>	<b>(4.644.072)</b>
<b>LABA BERSIH</b>	<u><b>Rp. 11.536.999</b></u>	<u><b>11.398.826</b></u>
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b>		
Laba bersih per saham	586,54	579,52
Laba bersih per ADS		
(40 saham Seri B per ADS)	23.461,60	23.180,80



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR : KEP-100/MBU/2002**

**TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);



Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

**Pasal 2**

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

**BAB II ...../3**



Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-3-

**BAB II  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN**

**Pasal 3**

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
  - a. SEHAT, yang terdiri dari :
    - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
    - AA apabila  $80 < TS \leq 95$
    - A apabila  $65 < TS \leq 80$
  - b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
    - BBB apabila  $50 < TS \leq 65$
    - BB apabila  $40 < TS \leq 50$
    - B apabila  $30 < TS \leq 40$
  - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
    - CCC apabila  $20 < TS \leq 30$
    - CC apabila  $10 < TS \leq 20$
    - C apabila  $TS \leq 10$
- (2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
  - a. Aspek Keuangan.
  - b. Aspek Operasional
  - c. Aspek Administrasi.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

**BAB III  
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.

2. Perubahan ...../4





Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-4-

- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

**Pasal 5**

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
  - Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
  - Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
  - Bendungan dan irigrasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 6**

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

**BAB IV  
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN**

**Pasal 7**

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

**Pasal 8**

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri



Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-5-

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 04 Juni 2002

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

t t d

**LAKSAMANA SUKARDI**



Lampiran I : 1/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**SALINAN**

**TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
I.	<b>SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN</b>	
		<b>Bidang Industri Pupuk dan Semen</b>
		1. PT Pupuk Sriwidjaja
		2. PT Asean Aceh Fertilizer
		3. PT Semen Baturaja
		4. PT Semen Kupang
		<b>Bidang Niaga</b>
		1. PT Dharma Niaga
		2. PT Pantja Niaga
		3. PT Cipta Niaga
		4. PT Satinah
		<b>Bidang Industri Farmasi dan Aneka Industri</b>
		1. PT Bhanda Ghara Rekso
		2. PT Berdikari
		3. PT Indo Farma
		4. PT Kimia Farma
		5. PT Bio Farma
		6. PT Rajawali Nusantara Indonesia
		7. PT Garam
		8. PT Industri Gelas
		9. PT Industri Soda Indonesia
		10. PT Sandang Nusantara
		11. PT Cambries Primisima
		<b>Bidang Pertambangan dan Energi</b>
		1. PT Sarana karya
		2. PT Batubara Bukit Asam
		3. PT Konservasi Energi Abadi
		4. PT Batan Tehnologi
		5. PT Perusahaan Gas Negara
		<b>Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan</b>
		1. PT Kertas Leces
		2. PT Kertas Kraft Aceh
		3. PT Pradnya Paramita
		4. PT Balai Pustaka



Lampiran I : 2/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		<b>Bidang Industri Strategis</b>
		1. PT Dirgantara Indonesia
		2. PT DAHANA
		3. PT Barata Indonesia
		4. PT Boma Bisma Indra
		5. PT Krakatau Steel
		6. PT Industri Kereta Api
		7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia
		8. PT Len Industri
II.	<b>SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI</b>	
		<b>Bidang Kawasan Industri</b>
		1. PT Kawasan Benkat Nusantara
		2. PT Kawasan Industri Makasar
		3. PT Kawasan Industri Medan
		4. PT Kawasan Industri Wijaya
		5. PT PDI Batam
		<b>Bidang Konstruksi Bangunan</b>
		1. PT Nindya Karya
		2. PT Wijaya Karya
		3. PT Waskita Karya
		4. PT Adhi Karya
		5. PT Brantas Abipraya
		6. PT Hutama Karya
		7. PT Istaka Karya
		8. PT Pembangunan Perumahan
		<b>Bidang Konsultan Konstruksi</b>
		1. PT Bina Karya
		2. PT Indah Karya
		3. PT Indra Karya
		4. PT Virama Karya
		5. PT Yodya Karya
		<b>Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol</b>
		1. PT Amarta Karya
		2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari
		3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
		4. PT Industri Kapal Indonesia
		5. PT Jasa Marga



Lampiran 1 : 3/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
III.	<b>SEKTOR PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA</b>	
	<b>Bidang Prasarana Perhubungan Laut</b>	
	1. PT Pelabuhan Indonesia I	
	2. PT Pelabuhan Indonesia II	
	3. PT Pelabuhan Indonesia III	
	4. PT Pelabuhan Indonesia IV	
	5. PT Rukindo	
	6. PT Varuna Tirta Prakasya	
	<b>Bidang Prasarana Perhubungan Udara</b>	
	1. PT Angkasa Pura I	
	2. PT Angkasa Pura II	
	<b>Bidang Sarana Perhubungan</b>	
	1. PT Pelayaran Djakarta Lloyd	1. PT Pelayaran Nasional Indonesia
	2. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2. PT Garuda Indonesia
	3. PT Pelayaran Bahtera Adiguna	3. PT Merpati Airlines
	4. PT Kereta Api Indonesia	
		<b>Bidang Pos</b>
		1. PT Pos Indonesia
		<b>Bidang Pariwisata</b>
		1. PT Hotel Indonesia dan Natour
		2. PT Pengembangan Pariwisata Bali
		3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
		<b>Bidang Penyiaran</b>
		1. PT Televisi Republik Indonesia
IV.	<b>SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN KEHUTANAN PERDAGANGAN</b>	
		<b>Bidang Perkebunan</b>
		1. PT Perkebunan Nusantara I
		2. PT Perkebunan Nusantara II
		3. PT Perkebunan Nusantara III
		4. PT Perkebunan Nusantara IV
		5. PT Perkebunan Nusantara V
		6. PT Perkebunan Nusantara VI
		7. PT Perkebunan Nusantara VII
		8. PT Perkebunan Nusantara VIII
		9. PT Perkebunan Nusantara IX



Lampiran I : 4/4  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

TABEL KELOMPOK BUMN  
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

NO.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		10. PT Perkebunan Nusantara X
		11. PT Perkebunan Nusantara XI
		12. PT Perkebunan Nusantara XII
		13. PT Perkebunan Nusantara XIII
		14. PT Perkebunan Nusantara XIV
		Bidang Perikanan
		1. PT Usaha Mina
		2. PT Perikanan Samodra Besar
		3. PT Tirta Raya Mina
		4. PT Penkani
		Bidang Pertanian
		1. PT Pertani
		2. PT Sang Hyang Seri
		Bidang Kehutanan
		1. PT Inhutani I
		2. PT Inhutani II
		3. PT inhutani III
		4. PT Inhutani IV
		5. PT Perhutani
V.	SEKTOR PELAYANAN UMUM	
	1. Perum Perumnas	
	2. Perum Jasa Tirta I	
	3. Perum Jasa Tirta II	
	4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar	
	5. Perum PPD	
	6. Perum Damri	
		1. Perum Percetakan Negara RI
		2. Perum Sarana Pengembangan Usaha
		3. Perum Perui
		4. Perum Pegadaian
		5. Perum PFN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Lampiran II : 1/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

SALINAN

TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN  
BUMN NON JASA KEUANGAN

I. ASPEK KEUANGAN

1. Total bobot
  - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
  - BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.  
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Colection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

3. Metode Penilaian
  - a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus:

$$\text{ROE} : \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
  - Aktiva tetap
  - Aktiva Non Produktif
  - Aktiva Lain-lain
  - Saham Penyertaan Langsung



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II: 2/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP 100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

*Tabel 2: Daftar skor penilaian ROE*

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus :

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
  - Aktiva Tetap
  - Aktiva lain-lain
  - Aktiva Non Produktif
  - Saham penyertaan langsung
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.





**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 3/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

*Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI*

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10,5 < ROI ≤ 12	6	9
9 < ROI ≤ 10,5	5	7,5
7 < ROI ≤ 9	4	6
5 < ROI ≤ 7	3,5	5
3 < ROI ≤ 5	3	4
1 < ROI ≤ 3	2,5	3
0 < ROI ≤ 1	2	2
ROI < 0	0	1

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

c. Rasio Kas/Cash Ratio

Rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

*Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio*

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
x ≥ 35	3	5
25 ≤ x < 35	2,5	4
15 ≤ x < 25	2	3
10 ≤ x < 15	1,5	2
5 ≤ x < 10	1	1
0 ≤ x < 5	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 4/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

d. Rasio Lancar/Current Ratio

**Rumus :**

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

**Definisi :**

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

*Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio*

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 <= x	3	5
110 <= x < 125	2,5	4
100 <= x < 110	2	3
95 <= x < 100	1,5	2
90 <= x < 95	1	1
x < 90	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

e. Collection Periods (CP)

**Rumus :**

$$\text{CP} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

**Definisi :**

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

*Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods*

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	x > 35	4	5
60 < x <= 90	30 < x <= 35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <= 30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <= 25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <= 20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <= 15	1,6	2,4
210 < x <= 240	6 < x <= 10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <= 6	0,8	1,2
270 < x <= 300	1 < x <= 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 5/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods : 1,2
- Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	35 < x	4	5
60 < x <= 90	30 < x <= 35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <= 30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <= 25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <= 20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <= 15	1,6	2,4
210 < x <= 240	6 < x <= 10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <= 6	0,8	1,2
270 < x <= 300	1 < x <= 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Lampiran II : 6/18  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-100/MBU/2002  
Tanggal : 4 Juni 2002

Contoh Perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

*Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset*

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x ≤ 120	15 < x ≤ 20	3,5	4,5
90 < x ≤ 105	10 < x ≤ 15	3	4
75 < x ≤ 90	5 < x ≤ 10	2,5	3,5
60 < x ≤ 75	0 < x ≤ 5	2	3
40 < x ≤ 60	x ≤ 0	1,5	2,5
20 < x ≤ 40	x < 0	1	2
x ≤ 20	x < 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70 % dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.